



This is an open access article under
CC-BY-SA license

* Corresponding Author

KEMISKINAN STRUKTURAL DAN KERENTANAN SOSIAL MASYARAKAT DI SEKITAR TPA CIPAYUNG

Moch. Ilham Noer Sunan^{1*}, Riska Nur Azizah², Ni Wayan Orissa Hrdayani Mas
Manuaba³, Shofira Nur Aliya P⁴, Adinda Annisa Zahra⁵

Universitas Indonesia

Email: ¹ilhamsunan5@gmail.com, ²riska.hikari@gmail.com,
³orissahrdayani@gmail.com, ⁴aliyashofira01@gmail.com, ⁵adindannisa21@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze structural poverty and social vulnerability among communities living around the Cipayung Final Disposal Site (TPA) in Depok City. Increasing urbanization has led to a significant rise in waste volume and landfill overcapacity, resulting in environmental and social problems. This research employs a qualitative approach with a case study method through observation, interviews, and documentation. The informants include local government officials, landfill managers, and surrounding communities such as waste pickers and informal sector workers. The results show that the community experiences structural poverty, characterized by limited access to education, formal employment, and social protection. Dependence on the informal waste sector leads to unstable and vulnerable income. In addition, the open dumping system causes environmental pollution that negatively impacts public health. The analysis, based on the poverty cycle theory by H.H. Munker and the structural poverty theory by Oscar Lewis, indicates that poverty arises from the interrelation of economic factors, health conditions, and limited access to resources.

Keyword: Structural poverty; social vulnerability; Cipayung landfill; informal sector.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemiskinan struktural dan kerentanan sosial masyarakat di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Kota Depok. Urbanisasi yang meningkat berdampak pada tingginya volume sampah dan kelebihan kapasitas TPA, sehingga menimbulkan masalah lingkungan dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri dari aparaturnya kelurahan, pengelola TPA, serta masyarakat sekitar seperti pemulung dan pekerja informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengalami kemiskinan struktural yang ditandai oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan formal, dan perlindungan sosial. Ketergantungan pada sektor informal persampahan menyebabkan pendapatan tidak stabil dan rentan. Selain itu, sistem open dumping menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Analisis menggunakan teori lingkaran kemiskinan dari H.H. Munker dan teori kemiskinan struktural dari Oscar Lewis menunjukkan bahwa kemiskinan terjadi akibat keterkaitan antara faktor ekonomi, kesehatan, dan keterbatasan akses sumber daya.

Kata Kunci: Kemiskinan struktural; kerentanan sosial; TPA Cipayung; sektor informal.



PENDAHULUAN

Fenomena urbanisasi yang terus meningkat di Indonesia telah membawa konsekuensi serius terhadap berbagai aspek kehidupan perkotaan, terutama dalam hal peningkatan volume sampah. Pertumbuhan penduduk yang pesat di wilayah perkotaan secara langsung berbanding lurus dengan peningkatan timbulan sampah harian. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi infrastruktur yang sangat penting dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan. Keberadaan TPA sering kali menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya (Ramadhani dkk., 2025). Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, dapat digunakan kerangka teori lingkaran kemiskinan dari H.H. Munker yang menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu siklus yang terdiri dari rendahnya pendapatan, buruknya kesehatan, dan rendahnya kemampuan investasi yang saling berkaitan dan terus berulang.

TPA di Indonesia pada umumnya masih menggunakan sistem *open dumping*, yaitu metode pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengolahan yang memadai (Lara Anjelita Tarigan & Sintong, 2024). Sistem ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran udara akibat gas metana, pencemaran tanah dan air akibat air lindi, serta risiko longsor sampah (Yunitasari Anggraeny dkk., 2023). Selain itu, keberadaan TPA juga memunculkan fenomena sosial berupa terbentuknya komunitas masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor persampahan informal, seperti pemulung dan pengepul barang bekas. Kondisi ini menciptakan relasi yang kompleks antara sampah, lingkungan, dan kemiskinan. Dalam perspektif teori kemiskinan struktural dari Oscar Lewis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur sosial dan ekonomi yang membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang (Gajdosikiené, 2004a).

Kondisi tersebut dapat dilihat secara nyata pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung di Kota Depok. TPA ini merupakan satu-satunya fasilitas pembuangan sampah akhir yang melayani seluruh wilayah Kota

Depok dengan luas sekitar 10,2 hingga 11,2 hektar. Secara ideal, TPA ini hanya mampu menampung sekitar 900–1.000-ton sampah per hari. Namun, berdasarkan data lapangan, volume sampah yang masuk ke TPA Cipayung telah melampaui kapasitas tersebut sejak tahun 2017, bahkan diperkirakan mencapai sekitar 1.200 ton per hari pada tahun 2026. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas (*overload*) yang serius, di mana daya tampung TPA yang sebesar ±1.200.000 m³ tidak lagi mampu menampung timbulan sampah yang terus meningkat. Dalam kerangka teori Munker, kondisi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan melalui penurunan kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Data menunjukkan bahwa timbulan sampah di Kota Depok mencapai sekitar 1.255 ton per hari, namun hanya sekitar 400 ton per hari yang dapat terolah di TPA Cipayung. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Kondisi tersebut diperparah oleh masih diterapkannya sistem *open dumping*, yang menyebabkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang memadai dan meningkatkan risiko pencemaran lingkungan secara luas. Dampak lingkungan dari kondisi ini sangat nyata dirasakan oleh masyarakat sekitar. Timbunan sampah yang menggunung menghasilkan gas metana dalam jumlah besar yang mencemari udara dan menimbulkan bau menyengat yang menyebar hingga ke permukiman warga. Selain itu, proses pembusukan sampah menghasilkan air lindi yang berpotensi mencemari tanah dan sumber air di sekitarnya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, timbulan sampah di Kota Depok diproyeksikan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Proyeksi ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Depok dalam merencanakan kebutuhan pelayanan persampahan, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pengumpulan,

pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Ringkasan proyeksi timbulan sampah Kota Depok tahun 2020–2033 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.1. Proyeksi Timbulan Sampah Kota Depok Tahun 2020–2033

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2033
Total timbulan sampah Kota Depok (ton/hari)	1.213,00	1.536,73
Kecamatan dengan timbulan sampah tertinggi	Tapos (155,41)	Tapos (199,33)
Kecamatan dengan timbulan sampah terendah	Cinere (60,00)	Cinere (60,09)
Tren timbulan sampah	Meningkat	Meningkat

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, 2026.

Berdasarkan Tabel 4.X, total timbulan sampah di Kota Depok diproyeksikan meningkat dari 1.213 ton per hari pada tahun 2020 menjadi 1.536,73 ton per hari pada tahun 2033. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan sekitar 323,73 ton per atau sekitar 26,7% selama periode proyeksi. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan pelayanan pengelolaan sampah akan semakin besar sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sistem persampahan di Kota Depok.

Kecamatan Tapos diproyeksikan menjadi wilayah dengan timbulan sampah tertinggi, yaitu meningkat dari 155,41 untuk mengetahui 199,33 ton per hari pada tahun 2033. Sebaliknya, Kecamatan Di sana merupakan wilayah dengan timbulan sampah terendah, yakni sekitar 60.000 pada tahun 2020 dan relatif tidak mengalami perubahan signifikan hingga 60 pada tahun 2033. Perbedaan jumlah timbulan sampah antarwilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepadatan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta tingkat aktivitas ekonomi di masing-masing kecamatan.

Masyarakat yang tinggal di sekitar TPA harus hidup dalam kondisi lingkungan yang tidak sehat, dengan paparan polusi udara, peningkatan populasi lalat dan nyamuk, serta risiko penyakit seperti infeksi saluran pernapasan (ISPA), diare, dan penyakit kulit. Dalam perspektif teori lingkaran kemiskinan, kondisi kesehatan yang buruk ini secara langsung berdampak pada menurunnya kapasitas kerja masyarakat,

sehingga memperkuat siklus kemiskinan yang sulit diputus. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan dan kemiskinan saling berkaitan secara erat dan tidak dapat dipisahkan.

Keberadaan TPA Cipayung juga membentuk struktur ekonomi lokal yang khas. Di wilayah Kelurahan Cipayung Jaya, khususnya di RT 05/RW 08 yang berdekatan langsung dengan TPA, terdapat sekitar 100 orang warga yang bekerja sebagai pemulung. Selain itu, banyak warga yang bekerja sebagai pengepul, penyortir sampah, maupun pelaku usaha kecil yang bergantung pada aktivitas TPA, seperti warung makan dan jasa tambal ban yang melayani truk pengangkut sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa TPA tidak hanya menjadi sumber masalah lingkungan, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar, meskipun dalam kondisi yang penuh keterbatasan.

Pekerjaan di sektor persampahan informal ini umumnya bersifat tidak stabil dan berpenghasilan rendah (Huzaemah, 2020). Harga jual barang daur ulang ditentukan oleh pengepul besar dan sangat bergantung pada fluktuasi pasar, misalnya harga besi sekitar Rp4.500/kg, plastik PVC dan PP sekitar Rp2.300/kg, serta plastik PETE dan HDPE sekitar Rp4.000/kg. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, para pemulung harus mengumpulkan hingga sekitar satu kuintal sampah per bulan, dengan pendapatan yang tetap tidak menentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat berada dalam posisi ekonomi yang sangat rentan. Dalam perspektif teori kemiskinan struktural, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam sistem ekonomi yang menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah dan sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Salah satu cara untuk memahami secara lebih mendalam kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung adalah melalui pendekatan kualitatif berbasis wawancara langsung dengan para aktor yang terlibat. Pendekatan ini penting karena data statistik semata tidak cukup mampu menangkap realitas keseharian, pengalaman hidup, serta dinamika kerentanan yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan berbagai informan yang merepresentasikan perspektif pemerintah, pengelola TPA, serta masyarakat

yang secara langsung terdampak oleh keberadaan TPA, baik sebagai pelaku ekonomi dalam sektor persampahan maupun sebagai warga yang hidup di lingkungan tersebut.

Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini dipilih secara purposif sampling berdasarkan keterkaitan langsung mereka dengan aktivitas dan dampak TPA Cipayung. Melalui wawancara mendalam, diperoleh berbagai informasi yang tidak hanya menggambarkan kondisi objektif, tetapi juga mencerminkan persepsi, pengalaman, serta keterbatasan yang dihadapi oleh masing-masing informan. Data wawancara ini menjadi penting karena mampu mengungkap dimensi kemiskinan yang bersifat struktural, yang sering kali tidak terlihat dalam data kuantitatif.

Hasil wawancara tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk tabel untuk memudahkan pemetaan informasi serta analisis lebih lanjut. Tabel ini tidak hanya memuat identitas informan, tetapi juga kutipan pernyataan yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan, serta interpretasi yang menunjukkan makna yang lebih dalam dari setiap pernyataan tersebut. Dengan demikian, tabel ini menjadi instrumen penting dalam menjembatani data empiris dengan analisis konseptual mengenai kemiskinan struktural dan kerentanan sosial.

Tabel 1.2. Informan Penelitian (Berbasis Hasil Wawancara)

No.	Nama Informan	Status/Profesi	Keterangan 1 (Hasil Wawancara)	Keterangan 2 (Makna/Interpretasi)
1	Bapak HM	Perangkat Kelurahan	"Kami dari kelurahan berusaha membantu warga, tapi memang tidak semua bisa tercover. Bantuan biasanya berupa bansos atau program lingkungan, tergantung anggaran yang ada."	Menunjukkan keterbatasan intervensi pemerintah serta kebijakan yang masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar masalah
2	Bapak F	Pegawai TPA	"Volume sampah setiap hari terus meningkat, sementara kapasitas TPA sudah lama terlampaui. Sistem yang digunakan juga	Menggambarkan adanya keterbatasan struktural dalam pengelolaan TPA yang berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat

			masih open dumping karena keterbatasan fasilitas."	
3	Bapak AM	Pengepul Sampah Plastik	"Harga sampah itu naik turun, tergantung pasar. Pemulung jual ke saya, tapi saya juga tergantung sama pengepul besar lagi."	Menunjukkan struktur ekonomi yang tidak adil dan posisi tawar pemulung yang lemah dalam rantai distribusi
4	Ibu IN	Warga (Tukang Pijat)	"Penghasilan saya tidak menentu, kadang ada yang panggil, kadang tidak. Kalau tidak kerja, ya tidak ada uang."	Menggambarkan kerentanan ekonomi pekerja informal dan ketidakpastian pendapatan
5	Ibu MJ	Pemulung	"Setiap hari saya ke TPA cari sampah yang bisa dijual. Kadang dapat banyak, kadang sedikit, tergantung keberuntungan."	Menunjukkan ketergantungan hidup pada sampah serta ketidakstabilan sumber penghasilan
6	Bapak LH	Pemulung	"Kalau lagi sakit, ya tidak bisa kerja. Tidak ada penghasilan. Kami juga tidak punya jaminan kesehatan."	Menunjukkan kerentanan sosial-ekonomi serta tidak adanya perlindungan sosial bagi pekerja informal
7	Ibu UB	Ibu Rumah Tangga	"Mau usaha juga susah, tidak ada modal. Sehari-hari ya cukup untuk makan saja sudah syukur."	Menggambarkan keterbatasan akses terhadap modal ekonomi dan kondisi kemiskinan yang bersifat struktural

Sumber: diolah oleh penulis dari hasil wawancara

Berdasarkan tabel yang telah disajikan, kondisi tersebut mencerminkan adanya kemiskinan struktural. Masyarakat tidak hanya mengalami keterbatasan pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan formal, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Data menunjukkan bahwa di Kelurahan Cipayung Jaya masih terdapat ribuan warga dengan tingkat pendidikan rendah, seperti 2.033 jiwa yang tidak tamat SD. Selain itu, sebagian besar pekerja di sektor informal tidak memiliki jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan, sehingga sangat rentan terhadap guncangan ekonomi maupun kesehatan.

Kondisi kesehatan masyarakat juga menunjukkan kerentanan yang tinggi (Suparto & Fahmi, 2024). Lingkungan yang tercemar menyebabkan masyarakat rentan terhadap berbagai penyakit, sementara akses terhadap fasilitas kesehatan masih terbatas pada layanan

dasar seperti puskesmas dan klinik. Meskipun terdapat 2 puskesmas dan 10 klinik di Kecamatan Cipayung, tingginya risiko penyakit akibat lingkungan membuat beban kesehatan masyarakat tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga multidimensi.

Penelitian mengenai kemiskinan masyarakat di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) telah dilakukan dengan berbagai fokus kajian. Huzaemah (2020) meneliti pola kehidupan sosial ekonomi pemulung di TPA Piyungan dan menyimpulkan bahwa aktivitas memulung menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat, meskipun pendapatan yang diperoleh relatif rendah dan tidak menentu. Sementara itu, Slamet dan Nasution (2020) mengkaji dampak sosial ekonomi keberadaan TPA terhadap masyarakat pemulung di Desa Mrican, Ponorogo, dengan hasil bahwa TPA memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan. Penelitian Lara Anjelita Tarigan dan Sintong (2024) juga menunjukkan bahwa keberadaan TPA memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui perubahan pola mata pencaharian dan tingkat pendapatan. Selain itu, Ningrum dan Yanti (2024) mengkaji kemiskinan struktural di Indonesia melalui pendekatan studi literatur yang menitikberatkan pada aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih membahas kemiskinan, dampak lingkungan, atau kondisi sosial ekonomi secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan antar aspek tersebut. (Huzaemah, 2020; Slamet & Nasution, 2020; Lara Anjelita Tarigan & Sintong, 2024; Ningrum & Yanti, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat research gap yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada dampak sosial ekonomi masyarakat atau dampak lingkungan akibat keberadaan TPA, tanpa mengintegrasikan analisis mengenai kemiskinan struktural, kerentanan sosial, kondisi lingkungan, dan kebijakan pemerintah dalam satu kerangka analisis. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menjadikan

pemulung sebagai satu-satunya subjek penelitian, sedangkan keterlibatan aktor lain seperti pemerintah daerah, pengelola TPA, pengepul, dan masyarakat sekitar masih sangat terbatas. Penelitian mengenai TPA Cipayung juga lebih banyak menyoroti persoalan pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan, sehingga belum banyak mengkaji bagaimana keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan formal, perlindungan sosial, kondisi kesehatan, serta kebijakan pengelolaan sampah saling berinteraksi dalam membentuk kemiskinan struktural dan kerentanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan studi kasus kualitatif yang mampu menjelaskan hubungan multidimensional antara faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan kebijakan pemerintah. (Ramadhani dkk., 2025; Anisa & Syafril, 2024).

Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yang mengintegrasikan teori Lingkaran Kemiskinan H.H. Munker dengan Teori Kemiskinan Struktural Oscar Lewis untuk menganalisis kondisi masyarakat di sekitar TPA Cipayung secara menyeluruh. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menitikberatkan pada satu aspek tertentu, penelitian ini menghubungkan kemiskinan struktural, kerentanan sosial, dampak lingkungan akibat sistem *open dumping*, ketergantungan masyarakat terhadap sektor persampahan informal, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam satu model analisis. Selain itu, penelitian ini menghasilkan temuan empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan, yaitu aparatur pemerintah, pengelola TPA, pemulung, pengepul, dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian kemiskinan struktural, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar TPA Cipayung.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana bentuk kemiskinan struktural yang dialami masyarakat sekitar TPA Cipayung, dan (2) bagaimana kerentanan sosial yang muncul akibat kondisi lingkungan dan ekonomi tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah

untuk menganalisis bentuk kemiskinan struktural yang dialami masyarakat serta mengidentifikasi berbagai bentuk kerentanan sosial yang mereka hadapi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya secara akademik, tetapi juga sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat rentan di sekitar TPA, sehingga pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena kemiskinan struktural dan kerentanan sosial masyarakat di sekitar TPA Cipayung. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pengalaman, persepsi, serta realitas sosial yang dialami masyarakat secara kontekstual dan komprehensif (Sugiyono, 2013). Lokasi penelitian berada di Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan fokus pada RT 05/RW 08 sebagai wilayah yang paling dekat dengan TPA Cipayung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya tingkat paparan dampak lingkungan serta adanya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor persampahan.

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, mulai dari proses persiapan, pengumpulan data, hingga analisis hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi lingkungan dan aktivitas sosial masyarakat, wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dari informan, sedangkan dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung yang memperkuat temuan penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Neuman, 2000). Kriteria tersebut

meliputi individu yang secara langsung terdampak oleh keberadaan TPA, seperti pemulung, warga sekitar, aparaturnya, serta pekerja sektor informal lainnya. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh lebih mendalam, spesifik, dan sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian (Neuman, 2000). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri atas 4 orang warga yang bermukim di sekitar TPA Cipayung, 3 orang pemulung yang menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas di TPA, 2 orang aparaturnya Kelurahan Cipayung Jaya, dan 1 orang pengelola atau petugas yang memahami kondisi operasional TPA. Karakteristik informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung terhadap dampak sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang ditimbulkan oleh keberadaan TPA Cipayung sehingga mampu memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.

Proses wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Setiap wawancara berlangsung sekitar 30–60 menit dengan tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan kondisi yang mereka alami. Selama proses wawancara, peneliti juga mencatat informasi penting dan, atas persetujuan informan, menggunakan alat perekam suara untuk memudahkan proses transkripsi dan analisis data.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013). Data yang telah dikumpulkan disederhanakan dan diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel, serta diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2013). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti warga, pemulung, aparaturnya, dan pengelola TPA. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang konsisten dan saling melengkapi. Selain

itu, validasi data dilakukan melalui member checking, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh dengan pengalaman yang mereka sampaikan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai kondisi kemiskinan struktural dan kerentanan sosial masyarakat di sekitar TPA Cipayung.

HASIL DAN DISKUSI

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar TPA

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung menunjukkan pola yang erat kaitannya dengan fenomena kemiskinan yang bersifat berulang dan sistemik. Untuk memahami kondisi ini secara lebih mendalam, penelitian menggunakan teori lingkaran kemiskinan yang dikemukakan oleh H.H. Munker. Menurut Nuscheler kemiskinan terjadi karena adanya siklus yang saling berkaitan dan sulit diputus, yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu rendahnya pendapatan yang berdampak pada rendahnya pendidikan dan produktivitas, kondisi kesehatan yang buruk yang menurunkan kapasitas kerja, serta rendahnya kemampuan untuk berinvestasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi (Sukmara, 2025). Ketiga unsur tersebut saling memperkuat dan menciptakan lingkaran yang menyebabkan masyarakat tetap berada dalam kondisi kemiskinan.

Jika dikaitkan dengan kondisi di lapangan, masyarakat di Kelurahan Cipayung Jaya, khususnya di wilayah RT 05/RW 08, sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor informal yang berkaitan dengan aktivitas TPA. Profil pekerjaan masyarakat didominasi oleh pemulung, pengepul, penyortir sampah, serta pekerjaan informal lainnya seperti tukang pijat dan pedagang kecil. Ketergantungan terhadap sektor ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal yang lebih stabil dan layak (Fardan, 2025.). Dalam perspektif teori Munker, kondisi ini merupakan bagian dari pola pertama, yaitu rendahnya pendapatan yang berdampak pada rendahnya produktivitas.

Pendapatan yang diperoleh masyarakat dari sektor informal cenderung tidak stabil dan sangat bergantung pada kondisi pasar serta jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu pemulung yaitu Bapak AM yang menyatakan bahwa *"setiap hari saya ke TPA cari sampah yang bisa dijual, kadang dapat banyak, kadang sedikit, tergantung keberuntungan."* Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki jaminan pendapatan yang tetap, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan (Ema Marsitadewi & Sudemen, 2024). Kondisi ini memperkuat lingkaran kemiskinan karena rendahnya pendapatan menyebabkan masyarakat tidak mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

Struktur ekonomi dalam sektor persampahan juga menunjukkan adanya ketimpangan. Harga jual barang daur ulang ditentukan oleh pengepul besar dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar, sehingga pemulung sebagai pelaku utama berada pada posisi yang lemah. Salah satu informan pemulung yaitu Bapak HM menyatakan bahwa *"harga sampah itu naik turun tergantung pasar, dan kami juga tergantung pada pengepul yang lebih besar."* Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki kendali atas sistem ekonomi yang mereka jalani, sehingga memperkuat posisi mereka dalam lingkaran kemiskinan.

Aspek kesehatan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kondisi kemiskinan masyarakat. Lingkungan yang tercemar di sekitar TPA menyebabkan masyarakat rentan terhadap berbagai penyakit, seperti gangguan pernapasan dan penyakit kulit. Kondisi kesehatan yang buruk ini berdampak langsung pada kemampuan kerja masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan yaitu Bapak LH bahwa *"kalau lagi sakit, ya tidak bisa kerja, tidak ada penghasilan."* Dalam teori Munker, kondisi ini merupakan bagian dari pola kedua, yaitu kesehatan yang buruk yang menyebabkan penurunan kapasitas kerja dan produktivitas (Prasetya dkk., 2024).

Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan modal juga menjadi hambatan bagi masyarakat untuk keluar dari kondisi kemiskinan (Slamet & Nasution, 2020). Data menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah,

yang berdampak pada terbatasnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan formal. Selain itu, keterbatasan modal membuat masyarakat sulit untuk mengembangkan usaha atau melakukan investasi yang dapat meningkatkan pendapatan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan yaitu pemulung Ibu MJ bahwa *"mau usaha juga susah, tidak ada modal."* Kondisi ini mencerminkan pola ketiga dalam teori Munker, yaitu rendahnya kemampuan investasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar TPA Cipayung menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat dengan teori lingkaran kemiskinan. Rendahnya pendapatan, buruknya kondisi kesehatan, serta terbatasnya kemampuan investasi saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain, sehingga menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Oleh karena itu, kemiskinan yang dialami masyarakat tidak dapat dipahami sebagai masalah individual semata, melainkan sebagai akibat dari struktur sosial dan ekonomi yang membatasi akses mereka terhadap sumber daya dan peluang. Penanganan permasalahan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada perbaikan kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap modal ekonomi.

Dampak Lingkungan terhadap Kehidupan Masyarakat

Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekologis, tetapi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi kemiskinan masyarakat di sekitarnya. Untuk memahami hubungan tersebut, penelitian ini menggunakan teori lingkaran kemiskinan yang dikemukakan oleh H.H. Munker. Dalam perspektif Nuscheler dalam Munker, kemiskinan terjadi karena adanya siklus yang saling berkaitan, yaitu rendahnya pendapatan yang berdampak pada rendahnya pendidikan dan produktivitas, kondisi kesehatan yang buruk yang menurunkan kapasitas kerja, serta rendahnya kemampuan untuk berinvestasi yang menghambat pertumbuhan (Ingstad dkk., 2012). Ketiga aspek ini membentuk suatu lingkaran yang terus berulang dan sulit diputus, terutama

pada masyarakat yang berada dalam lingkungan yang tidak mendukung.

Jika dikaitkan dengan kondisi di sekitar TPA Cipayung, dampak lingkungan menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat lingkaran kemiskinan tersebut, khususnya pada aspek kesehatan dan produktivitas. Salah satu dampak yang paling dominan adalah pencemaran udara akibat gas metana yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah. Gas ini tidak hanya menimbulkan bau menyengat, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama sistem pernapasan. Kondisi udara yang tercemar ini menyebabkan masyarakat lebih rentan terhadap penyakit, sehingga menurunkan kemampuan mereka untuk bekerja secara optimal. Dalam kerangka teori Munker, kondisi ini termasuk dalam pola kedua, yaitu kesehatan yang buruk yang berdampak pada menurunnya kapasitas kerja dan produktivitas.

Selain pencemaran udara, bau menyengat dari timbunan sampah menjadi masalah yang hampir dirasakan setiap hari oleh masyarakat. Bau tersebut menyebar hingga ke permukiman warga dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu informan yaitu Ibu UB menyatakan bahwa *"bau dari TPA sudah biasa, tapi tetap mengganggu, apalagi kalau angin ke arah rumah."* Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat hidup dalam lingkungan yang tidak layak, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Dampak lingkungan juga terlihat dari meningkatnya risiko penyakit, seperti infeksi saluran pernapasan (ISPA) dan penyakit kulit. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat mengaku sering mengalami gangguan kesehatan akibat paparan lingkungan yang tercemar. Bahkan, kondisi ini secara langsung berdampak pada pendapatan mereka, karena ketika sakit, mereka tidak dapat bekerja. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan yaitu Bapak LH bahwa *"kalau lagi sakit, ya tidak bisa kerja, tidak ada penghasilan."* Dalam perspektif teori lingkaran kemiskinan, kondisi ini memperkuat hubungan antara kesehatan yang buruk dan rendahnya pendapatan, yang pada akhirnya memperpanjang siklus kemiskinan.

Ancaman pencemaran lingkungan juga terjadi melalui air lindi yang berpotensi mencemari tanah dan sumber air di sekitar permukiman warga. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga dapat mengurangi kualitas sumber daya yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Adawiyah, 2020). Dampak jangka panjang dari kondisi ini adalah semakin terbatasnya kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga mereka tetap berada dalam kondisi kemiskinan. Hal ini berkaitan dengan pola ketiga dalam teori Munker, yaitu rendahnya kemampuan investasi akibat keterbatasan sumber daya dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh TPA Cipayung memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat lingkaran kemiskinan masyarakat. Pencemaran udara akibat gas metana, bau menyengat, meningkatnya risiko penyakit, serta ancaman pencemaran tanah dan air menunjukkan bahwa lingkungan yang tidak sehat menjadi faktor yang memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan teori lingkaran kemiskinan H.H. Munker, kondisi ini memperlihatkan bahwa faktor lingkungan berkontribusi langsung terhadap rendahnya kesehatan dan produktivitas, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya pendapatan dan kemampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak hanya dapat dilihat sebagai persoalan lingkungan semata, tetapi juga sebagai bagian dari siklus kemiskinan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kemiskinan Struktural di Komunitas Sekitar TPA

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kondisi kekurangan ekonomi, melainkan sebagai fenomena yang bersifat struktural dan berulang. Untuk menganalisis kondisi ini, penelitian menggunakan dua kerangka teori, yaitu teori lingkaran kemiskinan dari H.H. Munker dan teori kemiskinan struktural yang dikemukakan oleh Oscar Lewis. Dalam perspektif Munker, kemiskinan terjadi karena adanya siklus yang terdiri dari rendahnya pendapatan, buruknya kesehatan, dan

rendahnya kemampuan investasi yang saling berkaitan dan terus berulang (Bourgois, 2015). Sementara itu, Oscar Lewis menekankan bahwa kemiskinan juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang membatasi akses individu terhadap sumber daya, sehingga menciptakan kondisi yang diwariskan antar generasi dan sulit untuk diubah (Gajdosikienė, 2004b).

Salah satu bentuk nyata kemiskinan struktural di sekitar TPA Cipayung adalah keterbatasan pendidikan dan keterampilan masyarakat. Data menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, bahkan tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat sulit untuk bersaing di pasar kerja formal. Dalam perspektif teori Munker, rendahnya pendidikan ini merupakan bagian dari siklus kemiskinan yang berawal dari rendahnya pendapatan (Arifin & Sahari, 2021.). Sementara itu, dalam teori Oscar Lewis, kondisi ini mencerminkan adanya struktur sosial yang tidak memberikan akses yang memadai terhadap pendidikan, sehingga kemiskinan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Keterbatasan pendidikan tersebut berimplikasi langsung pada sulitnya akses masyarakat terhadap pekerjaan formal. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk memasuki sektor pekerjaan formal yang lebih stabil dan memberikan jaminan sosial. Akibatnya, mereka cenderung bekerja di sektor informal yang tidak memerlukan persyaratan pendidikan tinggi, tetapi memiliki tingkat risiko dan ketidakpastian yang tinggi. Hal ini menunjukkan adanya hambatan struktural dalam sistem ketenagakerjaan yang membatasi mobilitas sosial masyarakat (Yunitasari Anggraeny dkk., 2023). Dalam kerangka teori kemiskinan struktural, kondisi ini mencerminkan ketidakmerataan akses terhadap kesempatan ekonomi.

Ketergantungan masyarakat pada sektor ekonomi informal, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas TPA, juga menjadi indikator kuat adanya kemiskinan struktural. Masyarakat bekerja sebagai pemulung, pengepul, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan yang tidak stabil. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan Ibu MJ, "*penghasilan tergantung dari sampah yang didapat, kadang*

banyak, kadang sedikit.” Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki kontrol terhadap sumber pendapatan mereka. Dalam teori Munker, ketergantungan ini memperkuat siklus kemiskinan karena pendapatan yang rendah dan tidak stabil menghambat kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sementara dalam perspektif Oscar Lewis, kondisi ini mencerminkan keterjebakan dalam sistem ekonomi yang tidak memberikan peluang untuk berkembang.

Selain itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah juga menjadi faktor yang memperkuat kemiskinan struktural. Wilayah yang berada di sekitar TPA cenderung memiliki kualitas lingkungan dan infrastruktur yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh ketidakmerataan pembangunan yang menciptakan kesenjangan antar wilayah.

Kondisi kesehatan yang buruk akibat lingkungan yang tercemar juga memperkuat kemiskinan struktural. Masyarakat yang sering mengalami gangguan kesehatan tidak dapat bekerja secara optimal, sehingga pendapatan mereka menurun. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan yaitu Bapak LH, *“kalau sakit, tidak bisa kerja, berarti tidak ada penghasilan.”* Dalam teori Munker, kondisi ini merupakan bagian dari siklus kemiskinan yang menghubungkan kesehatan dengan produktivitas. Sementara dalam teori Oscar Lewis, kondisi ini mencerminkan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang layak sebagai bagian dari struktur sosial yang tidak merata.

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di sekitar TPA Cipayung merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu rendahnya pendidikan, terbatasnya akses pekerjaan formal, ketergantungan pada sektor informal, serta ketimpangan pembangunan. Berdasarkan teori lingkaran kemiskinan H.H. Munker, kondisi ini menunjukkan adanya siklus yang terus berulang dan sulit diputus. Sementara itu, berdasarkan teori kemiskinan struktural Oscar Lewis, kondisi tersebut

merupakan akibat dari struktur sosial dan ekonomi yang tidak memberikan akses yang setara bagi masyarakat (Schreiner, 2012). Dengan demikian, penanganan kemiskinan di wilayah ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup perbaikan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan.

Kerentanan Sosial Masyarakat

Kerentanan sosial masyarakat di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung merupakan konsekuensi dari kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Untuk memahami fenomena ini secara komprehensif, penelitian ini menggunakan teori lingkaran kemiskinan yang dikemukakan oleh H.H. Munker serta teori kemiskinan struktural dari Oscar Lewis. Dalam perspektif Munker, kerentanan sosial muncul sebagai bagian dari siklus kemiskinan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan, buruknya kesehatan, dan terbatasnya kemampuan investasi. Sementara itu, Oscar Lewis menekankan bahwa kerentanan tersebut merupakan hasil dari struktur sosial yang membatasi akses masyarakat terhadap perlindungan, sumber daya, dan kesempatan ekonomi (Gajdosikiené, 2004b).

Salah satu bentuk utama kerentanan sosial yang dialami masyarakat adalah ketidakstabilan pendapatan. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal, seperti pemulung, pengepul, dan pekerja jasa kecil, yang penghasilannya sangat bergantung pada kondisi lapangan dan fluktuasi pasar. Pendapatan yang tidak menentu ini menyebabkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup secara konsisten. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan yaitu Ibu MJ yang menyatakan bahwa, *“kadang dapat banyak, kadang sedikit, tergantung sampah yang didapat.”* Dalam teori Munker, kondisi ini mencerminkan pola rendahnya pendapatan yang menjadi awal dari siklus kemiskinan, karena ketidakstabilan ekonomi menghambat kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, kerentanan sosial juga diperparah oleh tidak adanya perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal. Berbeda dengan

pekerja formal yang memiliki jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, pekerja informal di sekitar TPA tidak memiliki akses terhadap perlindungan tersebut. Akibatnya, ketika mereka mengalami sakit atau kecelakaan kerja, tidak ada mekanisme perlindungan yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan yaitu Bapak LH bahwa *"kalau lagi sakit, tidak bisa kerja, tidak ada penghasilan."* Dalam perspektif kemiskinan struktural, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem perlindungan sosial yang tidak menjangkau kelompok masyarakat rentan.

Risiko kesehatan akibat kondisi lingkungan juga menjadi faktor utama yang memperkuat kerentanan sosial masyarakat. Lingkungan yang tercemar oleh gas metana, bau menyengat, serta potensi pencemaran air dan tanah menyebabkan masyarakat rentan terhadap berbagai penyakit, seperti infeksi saluran pernapasan dan penyakit kulit. Kondisi kesehatan yang buruk ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada ekonomi rumah tangga, karena menurunkan kemampuan untuk bekerja. Dalam teori Munker, hal ini merupakan bagian dari pola kedua, yaitu kesehatan yang buruk yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan pendapatan.

Selain itu, ketergantungan ekonomi keluarga pada pekerjaan yang rentan juga menjadi ciri penting dari kerentanan sosial di wilayah ini. Banyak keluarga yang menggantungkan seluruh sumber pendapatan pada satu jenis pekerjaan informal yang tidak stabil, seperti memulung atau bekerja di sektor persampahan. Ketika pekerjaan tersebut terganggu, misalnya karena sakit atau kondisi lingkungan, maka seluruh ekonomi keluarga ikut terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya diversifikasi sumber pendapatan memperbesar risiko kerentanan ekonomi. Dalam perspektif Oscar Lewis, kondisi ini mencerminkan keterjebakan dalam struktur sosial yang tidak memberikan alternatif pilihan ekonomi bagi masyarakat.

Kerentanan sosial masyarakat di sekitar TPA Cipayung merupakan hasil dari interaksi antara ketidakstabilan pendapatan, tidak adanya perlindungan sosial, risiko kesehatan akibat lingkungan, serta ketergantungan ekonomi pada pekerjaan yang rentan.

Berdasarkan teori lingkaran kemiskinan H.H. Munker, kondisi ini menunjukkan adanya siklus yang terus berulang dan memperkuat kemiskinan. Sementara itu, berdasarkan teori kemiskinan struktural Oscar Lewis, kerentanan tersebut merupakan akibat dari struktur sosial dan ekonomi yang tidak memberikan perlindungan dan akses yang memadai bagi masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kerentanan sosial ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penyediaan perlindungan sosial, perbaikan kesehatan lingkungan, serta perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi yang lebih stabil.

Peran Kebijakan Pemerintah

Peran kebijakan pemerintah dalam menangani kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung menjadi sangat krusial, terutama dalam upaya memutus rantai kemiskinan yang bersifat berulang dan struktural. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori lingkaran kemiskinan dari H.H. Munker serta teori pembangunan kesejahteraan sosial dari James Midgley. Teori Munker menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena siklus yang terdiri dari rendahnya pendapatan, buruknya kesehatan, dan rendahnya kemampuan investasi yang saling memperkuat (Midgley, 2014). Midgley menekankan bahwa kebijakan sosial harus bersifat produktif, yaitu tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan (Midgley, 1998).

Salah satu bentuk kebijakan yang telah dilakukan pemerintah adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sekitar TPA. Bantuan ini berupa bantuan langsung tunai, bantuan pangan, serta program perlindungan sosial lainnya yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat kelurahan, disampaikan bahwa bantuan sosial memang rutin diberikan, namun belum mampu menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pihak kelurahan yaitu Bapak HM bahwa *"kami berusaha membantu warga melalui bansos, tetapi memang tidak semua bisa tercover karena keterbatasan anggaran."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah

masih bersifat terbatas dan belum merata. Dalam perspektif teori Munker, bantuan sosial tersebut hanya menyentuh aspek konsumsi jangka pendek dan belum mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga belum efektif dalam memutus lingkaran kemiskinan.

Selain itu, pemerintah juga memiliki peran dalam pengelolaan sampah melalui berbagai program operasional TPA. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai TPA, diketahui bahwa sistem pengelolaan yang digunakan masih menggunakan metode *open dumping* akibat keterbatasan fasilitas dan teknologi. Salah satu pegawai TPA yaitu Bapak F menyatakan bahwa *"volume sampah terus meningkat setiap hari, sementara kapasitas sudah lama terlampaui dan fasilitas pengolahan masih terbatas."* Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan struktural dalam pengelolaan TPA yang berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat. Dalam kerangka teori Munker, lingkungan yang tidak sehat akan menurunkan kapasitas kerja masyarakat dan memperkuat siklus kemiskinan. Sementara dalam perspektif Midgley, kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan yang ada belum mampu menciptakan lingkungan yang layak sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial (Jones Finer, 1998).

Keterbatasan kebijakan pemerintah juga terlihat pada minimnya program pemberdayaan masyarakat yang bersifat jangka panjang. Berdasarkan hasil wawancara, program yang ada masih didominasi oleh bantuan langsung, tanpa diiringi dengan pelatihan keterampilan atau akses terhadap modal usaha. Aparatur kelurahan juga mengakui bahwa program pemberdayaan masih terbatas dan belum berjalan secara optimal. Akibatnya, masyarakat tetap bergantung pada sektor informal yang rentan dan tidak stabil. Dalam teori pembangunan kesejahteraan sosial Midgley, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum bersifat produktif, karena tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kemandiriannya.

Kebijakan yang ada juga belum mampu mengatasi akar permasalahan kemiskinan struktural, seperti rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan formal. Masyarakat di sekitar TPA masih menghadapi berbagai keterbatasan yang membuat mereka sulit untuk keluar dari kondisi kemiskinan.

Dalam teori lingkaran kemiskinan, kondisi ini menunjukkan bahwa siklus kemiskinan terus berulang karena tidak adanya intervensi yang mampu memutus hubungan antara rendahnya pendapatan, kesehatan, dan investasi (Anisa & Syafril, 2024). Sementara itu, dalam perspektif Midgley, kebijakan yang tidak inklusif dan tidak berorientasi pada pembangunan manusia akan gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Peran kebijakan pemerintah di sekitar TPA Cipayung masih cenderung bersifat reaktif dan jangka pendek, sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan struktural. Bantuan sosial memang memberikan manfaat dalam jangka pendek, namun tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Program pengelolaan sampah juga belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi dampak lingkungan yang memengaruhi kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Berdasarkan teori lingkaran kemiskinan H.H. Munker dan teori pembangunan kesejahteraan sosial James Midgley, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada intervensi yang bersifat struktural dan produktif. Hal ini meliputi peningkatan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan, penyediaan perlindungan sosial bagi pekerja informal, serta program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Cazorla dkk., 2018). Tanpa adanya kebijakan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang, kemiskinan yang dialami masyarakat di sekitar TPA akan tetap berulang dan sulit untuk diatasi secara mendasar.

Analisis Keterkaitan Faktor Struktural dalam Kemiskinan Masyarakat TPA

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari faktor individual, seperti rendahnya motivasi atau kemampuan kerja. Sebaliknya, temuan penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan tersebut merupakan hasil dari struktur sosial,

ekonomi, dan kebijakan yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang membatasi peluang masyarakat untuk keluar dari kondisi tersebut. Analisis ini diperkuat dengan menggunakan teori lingkaran kemiskinan dari H.H. Munker serta teori kemiskinan struktural dari Oscar Lewis.

Dalam perspektif teori lingkaran kemiskinan, kondisi masyarakat di sekitar TPA menunjukkan adanya hubungan yang erat antara rendahnya pendapatan, buruknya kondisi kesehatan, dan terbatasnya kemampuan investasi. Ketiga aspek ini saling memengaruhi dan membentuk siklus yang terus berulang. Masyarakat dengan pendapatan rendah tidak memiliki kemampuan untuk mengakses pendidikan yang layak, sehingga kualitas sumber daya manusia tetap rendah. Rendahnya pendidikan ini berdampak pada terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal yang lebih stabil dan berpenghasilan lebih tinggi. Akibatnya, masyarakat tetap bergantung pada sektor informal yang rentan dan tidak memberikan jaminan ekonomi jangka panjang.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat kemiskinan. Data menunjukkan masih banyak masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, bahkan tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Kondisi ini tidak hanya membatasi kemampuan individu dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik, tetapi juga menciptakan ketergantungan pada pekerjaan informal yang tidak membutuhkan keterampilan khusus. Dalam kerangka teori kemiskinan struktural, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap individu.

Selain itu, eksklusi masyarakat dari sektor ekonomi formal juga menjadi faktor penting yang memperkuat kemiskinan. Masyarakat di sekitar TPA cenderung tidak memiliki akses terhadap pekerjaan formal yang memberikan jaminan sosial dan stabilitas pendapatan. Sebaliknya, mereka bekerja di sektor informal, seperti pemulung dan pengepul, yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Dalam teori lingkaran kemiskinan, kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya pendapatan dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal saling

memperkuat satu sama lain. Sementara itu, dalam perspektif kemiskinan struktural, eksklusi ini merupakan bentuk ketidakadilan dalam sistem ekonomi yang tidak memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan pengelolaan sampah yang belum inklusif juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan masyarakat. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan TPA, seperti pengangkutan sampah dan pemberian bantuan sosial, kebijakan tersebut belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi. Sistem pengelolaan yang masih menggunakan metode *open dumping* menunjukkan adanya keterbatasan dalam pendekatan yang digunakan, baik dari segi teknologi maupun keberpihakan terhadap masyarakat terdampak. Kebijakan yang ada cenderung bersifat teknis dan belum menyentuh aspek sosial ekonomi masyarakat secara mendalam.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi di sekitar TPA Cipayung merupakan bentuk kemiskinan struktural yang memperkuat kerentanan sosial masyarakat. Kerentanan ini terlihat dari ketidakstabilan pendapatan, tidak adanya perlindungan sosial, serta tingginya risiko kesehatan akibat lingkungan yang tercemar. Dalam perspektif teori Munker, kondisi ini merupakan bagian dari siklus kemiskinan yang sulit diputus tanpa adanya intervensi yang komprehensif (Setyanti dkk., 2024). Sementara itu, dalam teori Oscar Lewis, kondisi ini mencerminkan adanya struktur sosial yang membatasi mobilitas sosial masyarakat dan menciptakan pola kemiskinan yang berulang (Gajdosikiené, 2004b).

Keberadaan TPA tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pengelolaan sampah, tetapi juga menciptakan ruang marginalisasi sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Masyarakat yang tinggal di sekitar TPA cenderung terpinggirkan secara sosial dan ekonomi, baik karena stigma negatif maupun keterbatasan akses terhadap sumber daya. Lingkungan yang tercemar serta kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat mereka sulit untuk meningkatkan kualitas hidup (Ningrum & Yanti, 2024). TPA dapat dipahami sebagai ruang yang tidak hanya menghasilkan limbah fisik, tetapi juga menciptakan "limbah

sosial” berupa kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Diskusi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi di sekitar TPA Cipayung bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial. Kemiskinan yang dialami masyarakat merupakan hasil dari interaksi antara faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif, yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi. Tanpa adanya perubahan struktural yang mendasar, kemiskinan dan kerentanan sosial yang dialami masyarakat di sekitar TPA akan terus berlanjut dan sulit untuk diatasi secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Masyarakat di sekitar TPA Cipayung mengalami kemiskinan yang bersifat struktural, yang ditandai oleh keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, serta perlindungan sosial. Kondisi ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, sebagaimana dijelaskan dalam teori lingkaran kemiskinan oleh H.H. Munker dan teori kemiskinan struktural dari Oscar Lewis. Ketergantungan masyarakat pada sektor informal persampahan, seperti pemulung dan pengepul, semakin memperkuat kondisi kerentanan ekonomi karena pendapatan yang tidak stabil dan minimnya jaminan sosial. Paparan lingkungan akibat aktivitas TPA, seperti pencemaran udara dan risiko penyakit, turut memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya produktivitas dan memperkuat siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar permasalahan kemiskinan struktural. Bantuan sosial yang diberikan memang mampu meringankan beban ekonomi masyarakat untuk sementara waktu, namun belum mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat secara

berkelanjutan. Sistem pengelolaan TPA yang masih memiliki berbagai keterbatasan juga menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang ada masih berfokus pada aspek teknis, tanpa diimbangi dengan pendekatan sosial yang komprehensif. Hal ini menyebabkan masyarakat tetap berada dalam kondisi rentan dan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan, karena tidak adanya perubahan signifikan pada struktur sosial dan ekonomi yang melingkupi kehidupan mereka.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak secara terpadu. Pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem pengelolaan TPA yang lebih ramah lingkungan serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, termasuk integrasi pekerja informal ke dalam sistem pengelolaan sampah yang lebih formal dan terlindungi. Akademisi diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait dampak sosial ekonomi TPA sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sektor swasta juga dapat berperan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan akses permodalan. Sementara itu, masyarakat sendiri perlu meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengembangkan inisiatif pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan, diharapkan permasalahan kemiskinan struktural dan kerentanan sosial di sekitar TPA dapat diatasi secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, S. E. (2020). *KEMISKINAN DAN FAKOR-FAKTOR PENYEBABNYA*. 1.
- Anisa, E., & Syafril, R. (2024). Government Strategy in Overcoming Structural Poverty in the South Coast. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 15(1), 164. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v15i1.76666>
- Arifin, M., & Sahari, A. (2021). *Legal Consequences on Cooperative Management Who Neglect to Carry Out Their Functions Resulting in Loss of Cooperatives Based on the 1992 Cooperative Law*.

- Bourgois, P. (2015). Poverty, Culture of. Dalam *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (hlm. 719–721). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.12048-3>
- Cazorla, A., Negrillo, X., Montalvo, V., & De Nicolas, V. L. (2018). Institutional Structuralism as a Process to Achieve Social Development: Aymara Women's Community Project Based on the Working with People Model in Peru. *The Journal of Sociology & Social Welfare*, 45(4). <https://doi.org/10.15453/0191-5096.4243>
- Ema Marsitadewi, K., & Sudemen, I. W. (2024). Kemiskinan Struktural di Karangasem: Menganalisis Penyebab dan Intervensi Pemerintah. *Jurnal Good Governance*, 19–32. <https://doi.org/10.32834/gg.v20i1.745>
- Fardan, M. (2025). *Unpacking Structural Poverty through a Sustainable Economic Lens: A Qualitative Literature Review*.
- Gajdosikienè, I. (2004a). Oscaro Lewiso skurdo kultūra: Kritika ir plètote. *Sociologija. Mintis Ir Veiksmas*, 13, 88–96. <https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.1.5951>
- Huzaemah, S. (2020). Sampah Adalah Berkah; Studi Pola Kehidupan Sosial Ekonomi Pemulung Di Sekitaran Tempat Pembuangan Ahir (TPA) Piyungan. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(1), 81–92. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i1.81-92>
- Ingstad, B., Munthali, A. C., Braathen, S. H., & Grut, L. (2012). The evil circle of poverty: A qualitative study of malaria and disability. *Malaria Journal*, 11(1), 15. <https://doi.org/10.1186/1475-2875-11-15>
- Jones Finer, C. (1998). James Midgley, *Social Welfare in a Global Context*, Sage, London, 1997, xvi + 245 pp., £19.95 paper. *Journal of Social Policy*, 27(2), 279–306. <https://doi.org/10.1017/S0047279498245296>
- Lara Anjelita Tarigan, & Sintong, M. (2024). DAMPAK KEBERADAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH TERHADAP KEADAAN SOSIAL EKONOMI PEMULUNG DI DESA TANJUNG SELAMAT KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal Samudra Geografi*, 7(2), 120–127. <https://doi.org/10.33059/jsg.v7i2.9535>
- Midgley, J. (1998). *Social development: The developmental perspective in social welfare* (Repr. d. Ausg. von 1995). Sage.
- Midgley, J. (2014). *Social development: Theory & practice*. Sage.
- Neuman, W. L. (2000). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (4th ed.). Allyn & Bacon.
- Ningrum, S. D. S., & Yanti, D. F. R. (2024). *ANALISIS LITERATUR TENTANG KEMISKINAN STRUKTURAL DI INDONESIA: PERSPEKTIF SOSIAL, EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK*. 1(4).
- Prasetya, S. R., Primandhana, W. P., & Wardaya, W. (2024). *Uncovering the Roots of Structural Poverty in East Java Province: An Analysis of Determinants*. 03(05).
- Ramadhani, R., Nurhangesti, M., Nasiha, S. S. M., Purwaningsih, A., Zaidan, M., Arifah, N. R., & Alfin, E. (2025). *Dampak Aktivitas TPA Terhadap Lingkungan: Pendekatan Kualitatif Deskriptif di Kawasan Cipayung Depok*.
- Schreiner, M. (2012). *Simple Poverty Scorecard® Poverty-Assessment Tool Indonesia*.
- Setyanti, A. M., Syafitri, W., Finuliyah, F., & Khoiruddin, M. A. (2024). Employed Yet Still Poor: A Microdata Analysis of Working Poverty in Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 19(3), 281–294. <https://doi.org/10.47198/jnaker.v19i3.403>
- Slamet, M. S., & Nasution, R. D. (2020). DAMPAK SOSIAL EKONOMI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BAGI PEMULUNG DESA MRICAN PONOROGO. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 4(1), 67–74. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v4i1.7878.2020>

Sugiyono. (2013.). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sukmara, A. R. (2025). *Poverty is Caused by Low Human Resources*. 4(07).

Suparto, J. D., & Fahmi, E. (2024). ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN: KAJIAN TERHADAP MEKANISME DEVELOPER'S CONTRIBUTION DI DKI JAKARTA. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, 8(1), 1-12. <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v8i1.23105>

Yunitasari Anggraeny, Moh. Mahdy Abyyu, & Velysa Novita Hariyanto. (2023). KONSTRUKSI SOSIAL PEKERJAAN PEMULUNG TPA PAKUSARI KABUPATEN JEMBER. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(2), 154-163. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v2i2.1436>